



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Perhubungan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Bandung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan



bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Perhubungan Kota Bandung diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun 2018 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. Gambaran Umum Dinas Perhubungan

C. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung mempunyai tugas dan kewajiban : membantu walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perhubungan

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan lingkup Perhubungan
- b. pelaksanaan kebijakan lingkup Perhubungan
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup perhubungan
- d. pelaksanaan administrasi lingkup Dinas



- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas dipimpin oleh Ir. DIDI RUSWANDI, MT yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat structural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:



D. Isu Strategis

Issue strategis yang dihadapi Dinas Perhubungan Kota Bandung adalah sebagai berikut :

1. Masih ada beberapa titik kemacetan yang belum teratasi
2. Penggunaan kendaraan pribadi masih tinggi jika dibandingkan dengan penggunaan kendaran umum.

E. Landasan Hukum



LKIP Kota Bandung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013 - 2018.

F. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bandung Tahun 2018 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA



Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reuiu.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1 Perencanaan Strategis Sebelum Reviu

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Bandung adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Bandung. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung Nomor 050/429 Tahun 2018 tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun 2014-2018 Perubahan. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota Bandung terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Bandung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Perhubungan Kota Bandung tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2014-2018.

Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Bandung telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota



Bandung Tahun 2014-2018 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Perhubungan Kota Bandung merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Perhubungan Kota Bandung dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Dinas Perhubungan Kota Bandung tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Bandung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Perhubungan Kota Bandung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Dinas Perhubungan Kota Bandung. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Bandung dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Kota Bandung yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera

Visi Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun 2014-2018 adalah :

TERWUJUDNYA SISTEM TRANSPORTASI KOTA YANG LEBIH BAIK UNTUK MENDUKUNG KOTA BANDUNG SEBAGAI KOTA YANG UNGGUL, NYAMAN DAN SEJAHTERA

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun 2014-2018 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

- a. Menciptakan kondisi lalu lintas yang terkendali.
- b. Mewujudkan sarana angkutan umum yang aman
- c. Menyediakan prasarana dan fasilitas perhubungan yang memadai
- d. Meningkatkan kapasitas kinerja Dinas Perhubungan Kota Bandung

3. Tujuan dan Sasaran



Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Perhubungan Tahun 2014-2018 sebanyak empat sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Perhubungan Kota Bandung sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Dinas Perhubungan Kota Bandung

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Tersedianya sarana angkutan umum yang aman	Terwujudnya sarana angkutan umum yang aman	Persentase angkutan umum yang laik jalan	95.5	96	96.5	97	97.5
2	Tersedianya prasarana dan fasilitas perhubungan yang memadai	Perpindahan penggunaan moda angkutan	Rasio Pengguna kendaraan pribadi dan pengguna angkutan umum	70 : 30	63 : 37	55 : 45	75:25	74:26
3	Aparat Dinas Perhubungan Kota Bandung semakin handal	Kapasitas Kinerja Dinas Perhubungan Kota Bandung semakin baik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	62	64	66	68	70
4	Terciptanya kondisi lalu	Terkendalinya kemacetan lalu	Persentase titik kemacetan			15	30	45



lintas yang terkendali	lintas	yang teratasi					
------------------------	--------	---------------	--	--	--	--	--

B. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Walikota Bandung Nomor : Tahun tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Bandung dan Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun 2014-2018.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kota Bandung tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
1	Terwujudnya sarana angkutan umum yang aman	Persentase angkutan umum yang laik jalan	%	Kondisi kendaraan angkutan umum yang laik jalan berpengaruh terhadap keselamatan penumpang	Kendaraan angkutan umum yang lulus uji dibagi jumlah kendaraan angkutan umum wajib uji x 100%	Kendaraan wajib uji yang dinyatakan lulus uji adalah kendaraan yang telah melewati serangkaian tes uji yang dilakukan di Balai pengujian kendaraan



						bermotor oleh para penguji kendaraan bermotor.
2	Perpindahan penggunaan moda angkutan	Rasio Pengguna kendaraan pribadi dan pengguna angkutan umum	%	Penggunaan kendaraan pribadi cenderung meningkat	Rasio pengguna angkutan pribadi dibandingkan dengan pengguna angkutan umum	Pengguna moda angkutan pribadi dan pengguna moda angkutan umum selama setahun.
3	Kapasitas Kinerja Dinas Perhubungan Kota Bandung semakin baik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	nilai	Masih belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat khususnya pengguna transportasi	Nilai hasil survey	Nilai IKM terhadap pelayanan Dinas Perhubungan Kota Bandung seperti pelayanan di Terminal, Pengujian Kendaraan Bermotor, Trans Metro Bandung, Parkir dsb
4	Terkendalnya kemacetan lalu lintas	Persentase titik kemacetan yang teratasi	%	Masih ada beberapa titik kemacetan yang perlu penanganan	Jumlah titik kemacetan yang tertangani dibagi jumlah titik kemacetan yang harus ditangani kali 100%	Apabila kecepatan rata-rata tempuh di titik kemacetan sudah mendekati kecepatan rata-rata tempuh kendaraan kota Bandung maka titik kemacetan tersebut dapat diklaim sudah teratasi



C. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun 2018 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun 2014-2018, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2018, Dinas Perhubungan Kota Bandung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kota Bandung
Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terkendalinya kemacetan lalu lintas	Persentase titik kemacetan yang teratasi	45
2	Terwujudnya sarana angkutan umum yang aman	Persentase angkutan umum yang laik jalan	97.5
3	Perpindahan penggunaan moda angkutan	Rasio Pengguna kendaraan pribadi dan pengguna angkutan umum	74:26
4	Kapasitas Kinerja Dinas Perhubungan Kota Bandung semakin baik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	70

2.2 Perencanaan Strategis Hasil Reviu



Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas dilakukan reviu terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung. Hasil reviu tersebut selanjutnya menjadi salah satu dasar perencanaan kinerja dan penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Tahun 2018, sebagai berikut :

A. Rencana Strategis Hasil Reviu

Hasil reviu pada rencana strategis Dinas Perhubungan terutama memperhatikan indikator dan target kinerja pada seluruh sasaran dengan maksud agar menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil reviu selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2018

Beberapa cacatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan reviu Rencana strategis Dinas Perhubungan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung antara lain :

Berdasarkan hasil reviu dan tindaklanjut perbaikan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2018 tersebut, selanjutnya diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Hasil Reviu
Dinas Perhubungan Kota Bandung

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2014	2015	2016	2017	2018
1	Tersedianya sarana angkutan umum yang aman	Terwujudnya sarana angkutan umum yang aman	Persentase angkutan umum yang laik jalan	%	95.5	96	96.5	97	97.5
2	Tersedianya	Perpindahan	Rasio Pengguna	%	70 :	63 :	55 :	75:25	74:26



	prasarana dan fasilitas perhubungan yang memadai	penggunaan moda angkutan	kendaraan pribadi dan pengguna angkutan umum		30	37	45		
3	Aparat Dinas Perhubungan Kota Bandung semakin handal	Kapasitas Kinerja Dinas Perhubungan Kota Bandung semakin baik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	nilai	62	64	66	68	70
4	Terciptanya kondisi lalu lintas yang terkendali	Terkendalnya kemacetan lalu lintas	Persentase titik kemacetan yang teratasi	%			15	30	100

B. Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu

Bersamaan dengan reviu rencana strategis juga dilakukan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil.

Berikut ini Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan hasil reviu berikut penjelasannya yang diuraikan pada table berikut :



Tabel 2.5
Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Kinerja Hasil Reviu
Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	KETERANGAN/KRITERIA
1	Terwujudnya sarana angkutan umum yang aman	Persentase angkutan umum yang laik jalan	%	Kondisi kendaraan angkutan umum yang laik jalan berpengaruh terhadap keselamatan penumpang	Kendaraan angkutan umum yang lulus uji dibagi jumlah kendaraan angkutan umum wajib uji x 100%		Kendaraan wajib uji yang dinyatakan lulus uji adalah kendaraan yang telah melewati serangkaian tes uji yang dilakukan di Balai pengujian kendaraan bermotor oleh para penguji kendaraan bermotor.
2	Perpindahan penggunaan moda angkutan	Rasio Pengguna kendaraan pribadi dan pengguna angkutan umum	%	Penggunaan kendaraan pribadi cenderung meningkat	Rasio pengguna angkutan pribadi dibandingkan dengan pengguna angkutan umum		Pengguna moda angkutan pribadi dan pengguna moda angkutan umum selama setahun.
3	Kapasitas Kinerja Dinas Perhubungan Kota Bandung semakin baik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	nilai	Masih belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat khususnya pengguna transportasi	Nilai hasil survey		Nilai IKM terhadap pelayanan Dinas Perhubungan Kota Bandung seperti pelayanan di Terminal, Pengujian Kendaraan Bermotor, Trans Metro Bandung, Parkir dsb
4	Terkendalinya kemacetan lalu lintas	Persentase titik kemacetan yang teratasi	%	Masih ada beberapa titik kemacetan yang perlu	Jumlah titik kemacetan yang tertangani dibagi		Apabila kecepatan rata-rata tempuh di titik



Dinas Perhubungan

				penanganan	jumlah titik kemacetan yang harus ditangani kali 100%		kemacetan sudah mendekati kecepatan rata-rata tempuh kendaraan kota Bandung maka titik kemacetan tersebut dapat diklaim sudah teratasi
--	--	--	--	------------	---	--	--



C. Perjanjian Kinerja Hasil Reviu

Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan hasil reviu dan sebagai bahan yang diperjanjikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung dengan Walikota Bandung dan besaran anggaran yang direncanakan melalui Program / Kegiatan pada Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Hasil Reviu
Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Terwujudnya sarana angkutan umum yang aman	Persentase angkutan umum yang laik jalan	%	97.5
2	Perpindahan penggunaan moda angkutan	Rasio Pengguna kendaraan pribadi dan pengguna angkutan umum	%	74:26
3	Kapasitas Kinerja Dinas Perhubungan Kota Bandung semakin baik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	nilai	70
4	Terkendalinya kemacetan lalu lintas	Persentase titik kemacetan yang teratasi	%	100



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Perhubungan Kota Bandung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Kota Bandung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2014-2018 maupun Rencana Kerja Tahun 2018 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Perhubungan.

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara



Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	Merah
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	Hijau
> 100%	Melebihi Target	Biru

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

**Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Perhubungan Kota Bandung
Tahun 2018**

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	Merah
2	Baik	75.00 – 89.99	Merah
3	Cukup	65.00 – 74.99	Merah
4	Kurang	50.00 – 64.99	Merah
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	Merah



Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Perhubungan Kota Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2014-2018 maupun Rencana Kerja Tahun 2018. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2018, hasil revidi dan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor :, telah ditetapkan sebanyak 4 sasaran dan sebanyak 4 indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator

B. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Perhubungan Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor



.551/416.. tanggal 2 Februari 2018 dan melalui Keputusan Walikota Bandung Nomor : tentang Indikator Kinerja Utama Kota Bandung. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Perhubungan Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Perhubungan Kota Bandung tahun 2018 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Perhubungan Kota Bandung
Tahun 2018

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase titik kemacetan yang teratasi	%	100	87,50	87,50
2	Persentase angkutan umum yang laik jalan	%	97.5	97,93	100,44
3	Rasio Pengguna kendaraan pribadi dan pengguna angkutan umum	%	74:26	73,86 : 26,14	100,54
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	nilai	70	77,76	111,09

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Dinas Perhubungan Kota Bandung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2014-2018. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun 2014-2018 sebanyak 4 sasaran.

Tahun 2018 adalah tahun ke 5 pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perhubungan, dari sebanyak 4 sasaran strategis dengan sebanyak 4 indikator



kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Dinas Perhubungan Kota Bandung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja
Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun 2018

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase titik kemacetan yang teratasi	%	100	87,50	87,50
2	Persentase angkutan umum yang laik jalan	%	97.5	97,93	100,44
3	Rasio Pengguna kendaraan pribadi dan pengguna angkutan umum	%	74:26	73,86 : 26,14	100,54
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	nilai	70	77,76	111,09

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas pada beberapa table berikut :

Tabel 3.3
Pencapaian Kinerja Sasaran
Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	75.00 %
2	Sesuai Target	0.00 %
3	Tidak Mencapai Target	25.00 %

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

Dari sebanyak 4 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.4
Pencapaian target Misi

No	Misi	Jumlah	Tingkat Pencapaian
----	------	--------	--------------------



		Indikator Sasaran	Melampaui target		Sesuai Target		Belum Mencapai Target	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Misi 1	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00
2	Misi 2	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00
3	Misi 3	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00
4	Misi 4	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00
	Jumlah	4	3	75.00	0	0.00	1	25.00

Dari sebanyak 4 sasaran dengan sebanyak 4 indikator kinerja, pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Bandung dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.5
Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No	Kategori	Jumlah Indikator	Persentase
A.	Misi 1	1	
1	Melebihi/Melampaui Target	0	0.00 %
2	Sesuai Target	0	0.00 %
3	Tidak Mencapai Target	1	100.00 %
B.	Misi 2	1	
1	Melebihi/Melampaui Target	1	100.00 %
2	Sesuai Target	0	0.00 %
3	Tidak Mencapai Target	0	0.00 %
C.	Misi 3	1	
1	Melebihi/Melampaui Target	1	100.00 %
2	Sesuai Target	0	0.00 %
3	Tidak Mencapai Target	0	0.00 %
D.	Misi 4	1	
1	Melebihi/Melampaui Target	1	100.00 %
2	Sesuai Target	0	0.00 %



3	Tidak Mencapai Target	0	0.00 %

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-pembandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2018 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 4 sasaran dan sebanyak 4 indikator kinerja dari sebanyak 4 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perhubungan Kota Bandung tahun 2014-2018, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

**Sasaran 1**

Terkendalnya kemacetan lalu lintas

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.?
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Terkendalnya kemacetan lalu lintas

No	Indikator or Kinerja	Satuan	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Persentase titik kemacetan yang teratasi	%	--	--	0,00	-	--	0,00	--	---	-	81,25	75	92,3	100	87,50	87,5

Sasaran Terkendalnya kemacetan lalu lintas dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase titik kemacetan yang teratasi" adalah sebesar dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 87,50 %, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase titik kemacetan yang teratasi" tahun ini menurun 4,8 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 92,30%

Tahun 2018 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Persentase titik kemacetan yang teratasi" tahun ini adalah sebesar 87,50 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Perhubungan maka capaian kerjanya mencapai 87,50 %.

**Sasaran 2**

Terwujudnya sarana angkutan umum yang aman

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.?**Analisis Pencapaian Sasaran 2****Terwujudnya sarana angkutan umum yang aman**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Persentase angkutan umum yang laik jalan	%	95.5	95.5	100.00	96	98.23	102.32	96.5	99.06	102.21	97	96.35	99.33	97.5	97,93	100,44

Sasaran Terwujudnya sarana angkutan umum yang aman dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase angkutan umum yang laik jalan" adalah sebesar dari target sebesar 97.5 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.44 %, capaian ini mencapai target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase angkutan umum yang laik jalan" tahun ini meningkat 1,11 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 99.33

Tahun 2018 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Persentase angkutan umum yang laik jalan" tahun ini adalah sebesar 97,93 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Perhubungan maka capaian kinerjanya mencapai 100.44 %.

**Sasaran 3**

Perpindahan penggunaan moda angkutan

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.?
Analisis Pencapaian Sasaran 3
Perpindahan penggunaan moda angkutan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Rasio Pengguna kendaraan pribadi dan pengguna angkutan umum	%	70 : 30	78:22	73.33	63 : 37	-	0.00	55 : 45	n/a	0.00	75:25	80.5:19.5	78.00	74:26	73,86 : 26,14	100.54

Sasaran Perpindahan penggunaan moda angkutan dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Rasio Pengguna kendaraan pribadi dan pengguna angkutan umum" adalah sebesar dari target sebesar 74:26 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.54 %, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Rasio Pengguna kendaraan pribadi dan pengguna angkutan umum" tahun ini menurun 78.00 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 78.00

Tahun 2018 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Rasio Pengguna kendaraan pribadi dan pengguna angkutan umum" tahun ini adalah sebesar 100.54 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Perhubungan maka capaian kinerjanya mencapai 100.54 %.

**Sasaran 4**

Kapasitas Kinerja Dinas Perhubungan Kota Bandung semakin baik

Pencapaian sasaran 4 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.?**Analisis Pencapaian Sasaran 4****Kapasitas Kinerja Dinas Perhubungan Kota Bandung semakin baik**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	nilai	62	71.18	114.81	64	66.45	103.83	66	72.98	110.58	68	82.96	122.00	70	77,76	0.00

Sasaran Kapasitas Kinerja Dinas Perhubungan Kota Bandung semakin baik dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)" adalah sebesar dari target sebesar 70 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 111.09 %, capaian ini mencapai target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)" tahun ini menurun 122.00 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 122.00

Tahun 2018 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)" tahun ini adalah sebesar 111,09 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Perhubungan maka capaian kerjanya mencapai 111,09 %.



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun 2018 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun 2018. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun 2018 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Perhubungan Kota Bandung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2018 Dinas Perhubungan Kota Bandung menetapkan sebanyak 4 (empat) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 81.25 %
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.44 %
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.54 %
- Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 111.09 %

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 4 sasaran tersebut, secara umum telah tidak mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2018 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 113.408.747.894 sedangkan



realisasi anggaran mencapai Rp. 83.762.030.860,- dengan demikian dapat dikatakan tahun 2018 Dinas Perhubungan Kota Bandung kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 29.646.717.034,-

Renstra Dinas Perhubungan Kota Bandung 2014-2018 menetapkan sebanyak 4 (empat) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan tahun ke 5 dari lima tahun yang direncanakan yaitu pada tahun 2018, dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 81.25 %
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.44 %
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.54 %
- Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 111.09 %



Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 113.408.747.894 (seratus tiga belas milyar empat ratus delapan juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah) telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Dinas Perhubungan Kota Bandung. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung adalah 73.86 % dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Perhubungan Kota Bandung perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Bandung.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kota Bandung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Perhubungan Kota Bandung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bandung.

Bandung, Januari 2018
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BANDUNG

Ir. DIDI RUSWANDI, MT
NIP. 19680710 199503 1 002